

BAB I

PENDAHULUAN

A. Desentralisasi Memengaruhi Profesionalisme Guru

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam kehidupan dewasa ini, di era pasar bebas kita dihadapkan pada perusahaan-perusahaan tidak menentu yang mengakibatkan hubungan tidak lancar antara pendidikan dengan lapangan kerja atau *one to one relationship*. Karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya desentralisasi,

sangat besar pengaruhnya terhadap profesionalisme guru, karena guru bisa seluas-luasnya berkarya dan berinovasi dan juga kesempatan untuk mengembangkan karier dan prestasinya cukup besar. Manfaat desentralisasi yang cukup besar diterima para guru adalah mudahnya birokrasi pendidikan, walaupun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikannya.

Desentralisasi menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, hal ini mempunyai makna bahwa semula urusan-urusan pemerintah termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar dapat mandiri, sehingga mampu mengatur rumah tangganya, baik dalam mengambil kebijakan maupun dalam memutuskan pengaturan struktur pemerintahannya sendiri. Di samping itu, desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Keuntungan desentralisasi adalah sama dengan delegasi, yaitu mengurangi beban atasan dalam suatu tugas pekerjaan yang berat atau tidak dapat dikerjakan sendiri.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kegiatan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Di antaranya adalah pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan

dengan kondisi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

B. Perjalanan Singkat Kurikulum SMA di Indonesia

Perkembangan kurikulum di Indonesia sangat unik dan perjalanannya sungguh panjang, karena selalu melalui uji coba dan tidak sedikit biaya yang digelontorkan oleh pemerintah untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi eksistensi kurikulum tersebut. Secara formal, sejak zaman Belanda sudah terdapat sekolah, artinya kurikulum juga sudah ada.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1942 – 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK) sampai kepada KTSP. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang

berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

1. Zaman Pendudukan Belanda

Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran memiliki ciri khas di mana kurikulum pendidikan diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga halnya dengan pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air.

Kurikulum SMA pada masa Belanda adalah AMS (*Algemene Midelbare School*), lama bersekolah 3 tahun. Sekolah ini berdiri pada tahun 1919. Mata pelajaran pokok AMS bagian AI (Kesusastaan Timur) adalah bahasa Melayu dan Jawa. Sedangkan sejarah Indonesia ditinjau dari kepentingan Belanda.

AMS ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia (tamatan MULO untuk meneruskan pelajaran).
- Sebagai jembatan untuk meneruskan ke perguruan tinggi.
- Mendidik peserta didik untuk menjadi pegawai-pegawai kolonial Belanda dan mempertahankan kekuasaannya.

2. Pada Periode 1942 – 1945, Masa Penjajahan Jepang

Di mana kurikulum yang diterapkan bertujuan agar rakyat dapat membantu pertahanan Jepang. Karena itu, *vak* yang diajarkan pada masa pemerintahan Belanda diubah sesuai dengan keinginan bangsa Jepang. Sebab pada masa

itu pembelajaran di kelas, bahasa Belanda diubah menjadi bahasa Jepang. Mata pelajaran Ilmu Bumi, Sejarah, Tata Negara yang dahulunya terpusat pada Belanda, diubah terpusat pada Jepang (Asia Timor Raya). Mata pelajaran Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Hayat dijadikan pengetahuan dasar, seperti yang diberikan MULO (masa Belanda), yaitu pada bagian Ilmu Pasti Alam. Musik nyanyian Belanda diganti dengan nyanyian Jepang.

Kurikulum SMA pada masa Jepang pada tahun 1942, AMS diganti menjadi Sekolah Menengah Tinggi (SMT), lamanya 3 tahun. Pada masa ini, yang sangat penting untuk diketahui adalah pemakaian bahasa Belanda dilarang, bahasa resmi dan pengantar menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib, pengajaran adat istiadat Jepang dan sejarah Jepang sangat penting, dan pelajaran Ilmu Bumi dalam aspek geopolitik.

Terdapat hal positif pada masa Jepang dalam melaksanakan pendidikan, antara lain bahasa Indonesia dipelajari merata di seluruh pelosok tanah air. Cinta kebudayaan dan kemerdekaan muncul, dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh kesempatan belajar. Namun tetap diakui bahwa misi Jepang datang ke Indonesia menjadi tujuan utamanya dalam memperkokoh pertahanannya di Asia Pasifik, yakni membantu Perang Pasifik dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.

3. Pada Masa Republik Indonesia Tahun 1950 – 1965

Lahir Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yang kemudian

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945. Pada Bab II pasal 3, diungkapkan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Bab III pasal 4 berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Dengan adanya kedua pasal tersebut, sangat penting dan membawa ke arah perubahan dan tujuan pendidikan bagi anak bangsa dan pengelola pendidikan pada masa itu. Pada tahun tersebut, Sekolah Menengah Atas (SMA) dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Bagian A: Jurusan Kesusastaan
- b. Bagian B: Jurusan Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
- c. Bagian C: Jurusan Sosial ekonomi

Tujuannya adalah untuk menyiapkan seluruh lapisan masyarakat yang berguna dan mendidik anak bangsa agar dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Kurikulum (1975 – 1984) yang Memiliki:

a. Dasar

KPTD, MPR-RI No.IV/MPR/1973.

Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri

dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

b. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran

Tujuan pendidikan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus.

c. Orientasi Pelajaran

Keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap, antara pelajaran teori dan praktik, menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran.

d. Kualifikasi Kelulusan

Tegas, jelas, dan terarah pada lapangan pekerjaan tertentu. Memiliki aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

e. Orientasi Kurikulum

Pendekatan bidang studi program yang terdiri dari program umum, akademik/kejuruan, pendidikan keterampilan.

f. Pendekatan Metodologi Pengajaran

- 1) Pendekatan PPSI dan Model Satuan Pelajaran
- 2) Menggunakan konsep CBSA
- 3) Lengkap dengan pedoman metode, evaluasi, bimbingan administrasi, dan supervisi

g. Desain Kurikulum

- 1) Berorientasi pada tujuan
- 2) Efisiensi dan efektivitas
- 3) Relevansi dengan kebutuhan

- 4) Keluwesan dan keadaan
- 5) Pendidikan seumur hidup

h. Penilaian

Penilaian formatif dan sumatif TPB, EBTA, EBTANAS.

i. Kurikulum Tahun 1984

Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik.
- 3) Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah.
- 4) Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
- 5) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan luar sekolah.
- 6) Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja.

Atas dasar perkembangan itu, maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.
- 2) Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- 3) Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
- 4) Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
- 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak, dengan

menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar, dan dari sederhana menuju ke kompleks.

- 6) Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran. Bahkan berikutnya, pemerintah akan memprogramkan wajib belajar 12 tahun.

j. Kurikulum Tahun 1994

Kurikulum tahun 1994 ini terkenal dengan programnya, yaitu program wajib belajar (wajib) 9 tahun dan adanya kurikulum lokal. Tampaknya sampai saat ini terus berjalan dan terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu perbaikan di segala lini.

Dapat dipahami bahwa kurikulum Sekolah Menengah Umum pada tahun 1994 sangatlah fleksibel, yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan pendidikan menengah kejuruan mementingkan untuk dipersiapkan masuk kepada dunia usaha, dunia industri atau memasuki lapangan pekerjaan, serta mengembangkan sikap profesional. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Idi, adanya perubahan dan perkembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat itu sendiri.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut: